

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2013

Jalan Lingkar Barat Nomor 5

Purworejo - Jawa Tengah 54171

Telp. 0275-323180 Fax. 0275-323180

e-mail : pa_purworejo@yahoo.co.id

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Purworejo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Purworejo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purworejo, 30 Juni 2013

Ketua,

Ttd.

Drs. BAHRUDDIN
NIP.195712071986031004

Daftar Isi

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Purworejo	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	16
B.2. Belanja Negara	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	22
C.2. Aset Tetap	24
C.3. Aset Lainnya	27
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	28
C.5. Ekuitas Dana Lancar	29
C.6. Ekuitas Dana Investasi	29
D. Pengungkapan Penting Lainnya	

D.1.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	30
D.2.	Rekening Pemerintah	30
D.3.	Pengungkapan Lain-lain	
D.3.1.	Revisi DIPA	30
D.3.2.	Catatan Penting Lainnya	30
Laporan-laporan Pendukung		
A.	LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
B.	LRA Belanja dan Pengembalian Belanja	
C.	Neraca Percobaan	
Lampiran-lampiran		
D.	Laporan Barang Pengguna	
D.1.	Laporan Posisi BMN di Neraca	
D.2.	Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per Kelompok	
D.3.	Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per Kelompok	
D.4.	Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per Kelompok	
D.5.	Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah per Kelompok	
D.6.	Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud per Kelompok	
D.7.	Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kelompok	
E.	Lampiran Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK	
F.	Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga 2013	

Daftar Tabel

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2013 dan 2012	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012	2
Tabel 3	Penggolongan Kualitas Piutang	15
Tabel 4	Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNB	16
Tabel 5	Perbandingan Realisasi PNB per 30 Juni 2013 dan 2012	17
Tabel 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2013	18
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2013 dan 2012	19
Tabel 8	Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni TA 2013 dan 2012	19
Tabel 9	Perbandingan Belanja Barang 30 Juni TA 2013 dan 2012	20
Tabel 10	Perbandingan Belanja Modal 30 Juni TA 2013 dan 2012	21
Tabel 11	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	22
Tabel 20	Rincian Persediaan	23
Tabel 21	Rincian Aset Tetap	24
Tabel 22	Rincian Saldo Tanah	24
Tabel 27	Rincian Aset Lainnya	27

Pengadilan Agama Purworejo

Jalan Lingkar Barat Nomor 5 Purworejo - Jawa Tengah 54171

Telp. 0275-323180 Fax. 0275-323180 e-mail : pa_purworejo@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purworejo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purworejo telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purworejo, 30 Juni 2013
Kuasa Pengguna Anggaran
Panitera/Sekretaris,

Ttd.

H. SUKARTUN, SH
NIP.195408061978031001

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013 .

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan periode yang berakhir tanggal 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp. 9.671.240,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 . Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal sepenuhnya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp. 1.844.367.363,00 atau mencapai 61,68% dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 dan periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel I. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2013 30 Juni TA 2012

(dalam satuan rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2013			30 Juni TA 2012
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0,00	9.671.240,00	0,00	4.642.590,00
Belanja	2.990.061.000,00	1.844.367.363,00	61,68	1.293.358.952,00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2013 dan dibandingkan dengan 30 Juni 2012 .

a. Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 3.680.177.214,00 yang terdiri dari :

- 1) Aset Lancar sebesar Rp. 45.802.760,00
- 2) Aset Tetap sebesar Rp. 3.630.037.683,00
- 3) Aset Lainnya sebesar Rp. 4.336.771,00

b. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 26.000.000,00 yang terdiri dari

- 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 26.000.000,00
- 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00

c. Jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 3.654.177.214,00 yang terdiri dari

- 1) Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 19.802.760,00
- 2) Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 3.634.374.454,00

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 dapat dilihat padatabel di berikut.

Tabel II. Ringkasan Laporan Neraca per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2013	30 Juni 2012	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	45.802.760,00	19.720.460,00	26.082.300,00	132,26
Aset Tetap	3.630.037.683,00	4.335.928.249,00	-705.890.566,00	-16,28
Aset Lainnya	4.336.771,00	2.500.000,00	1.836.771,00	73,47

Jumlah Aset	3.680.177.214,00	4.358.148.709,00	-677.971.495,00	-15,55
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	26.000.000,00	179.278.696,00	-153.278.696,00	-85,49
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	19.802.760,00	-159.558.236,00	179.360.996,00	-112,41
Ekuitas Dana Investasi	3.634.374.454,00	4.338.428.249,00	-704.053.795,00	-16,22
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.680.177.214,00	4.358.148.709,00	-677.971.495,00	-15,55

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2013 DAN 2012 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Cata	TA 2013			TA 2012
		Anggaran / Estimasi	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0,00	9.671.240,00	0,00	4.642.590,00
Jumlah Pendapatan		0,00	9.671.240,00	0,00	4.642.590,00
BELANJA					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	2.238.970.000,00	1.559.152.642,00	69,63	1.064.154.530,00
2. Belanja Barang	B.2.2.	493.091.000,00	207.292.821,00	42,03	198.654.422,00
3. Belanja Modal	B.2.3.	258.000.000,00	77.921.900,00	30,20	30.550.000,00
Jumlah Belanja		2.990.061.000,00	1.844.367.363,00	61,68	1.293.358.952,00

**SilahkanlihatCatatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

NERACA

PER 30 JUNI 2013 DAN 30 Juni 2012

(dalam satuan rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2013	30 Juni 2012
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	26.000.000,00	0,00
Jumlah Kas dan Bank		26.000.000,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0,00	0,00
Persediaan	C.1. 3.	1.606.000,00	1.987.100,00
Jumlah Aset Lancar		27.606.000,00	1.987.100,00
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	1.803.217.500,00	1.803.217.500,00
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	613.367.796,00	647.163.791,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2. 3.	-712.016.471,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C.2. 4.	1.875.208.000,00	1.875.208.000,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2. 5.	0,00	0,00
Jalanan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 6.	49.821.900,00	9.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Jalanan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 7.	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.2. 8.	438.958,00	438.958,00
Jumlah Aset Tetap		3.630.037.683,00	4.335.928.249,00
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	2.500.000,00	2.500.000,00
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	67.375.542,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	-65.538.771,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		4.336.771,00	2.500.000,00
Jumlah Aset		3.661.980.454,00	4.375.415.349,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0,00	0,00
Uang Mukadiri KPPN	C.5. 2.	26.000.000,00	35.000.000,00

JumlahKewajibanJangkaPendek		26.000.000,00	35.000.000,00
JumlahKewajiban		26.000.000,00	35.000.000,00
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
CadanganPiutang	C.6. 1.	0,00	0,00
CadanganPersediaan	C.6. 2.	1.606.000,00	1.987.100,00
Dana Yang HarusDisediakanUntukPembayaranUtangJang Pendek	C.6. 3.	0,00	0,00
JumlahEkuitas Dana Lancar		1.606.000,00	1.987.100,00
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
DiinvestasikandalamAsetTetap	C.7. 1.	3.630.037.683,00	4.335.928.249,00
DiinvestasikandalamAsetLainnya	C.7. 2.	4.336.771,00	2.500.000,00
JumlahEkuitas Dana Investasi		3.634.374.454,00	4.338.428.249,00
JumlahEkuitas Dana		3.635.980.454,00	4.340.415.349,00
JumlahKewajibandanEkuitas Dana		3.661.980.45400	4.375.415.349,00

**SilahkanlihatCatatanatasLaporanKeuanganpadaBagian III yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariLaporanKeuanganini.*

III. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

- k. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2012 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- n. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan No. S-4215A/PB/2013 mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga Semester I 2013.

A.2. Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Purworejo

A.2.1. Rencana Strategis

Tahun 2013 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Purworejo.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Purworejo sebagai visi dan misinya.

Visi dan misi Pengadilan Agama Purworejo adalah

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Purworejo melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya dan dapat mengayomi masyarakat.
- Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana, dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Purworejo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKGL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2.) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3.) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Pengadilan Agama

Purworejo per 30 Juni 2013 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*)
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(4.) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5.) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6.) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

(7.) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Pada Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013, Pengadilan Agama Purworejo telah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara
bukan Pajak
Lainnya
(netto) :Rp.
9.671.240,00*

Keseluruhan Pendapatan Negara yang diterima oleh Pengadilan Agama Purworejo berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp. 5.028.650,00 (108,31%) dari penerimaan PNBP Lainnya tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan PNBP Lainnya pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 9.671.240,00 (0,00% dari estimasinya), sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 diterima PNBP Lainnya sebesar Rp. 4.642.590,00 (0,00% dari estimasinya).

Tabel 4
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
	Pendapatan Lainnya	0,00	9.671.240,00	0,00
	Pengembalian		0,00	0,00
	Total		9.671.240,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)

Pendapatan Lainnya diantaranya adalah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan penerimaan pendapatan Lainnya sebesar Rp. 5.028.650,00 (108,31%) dari penerimaan tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan pendapatan lainnya pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 9.671.240,00 (0,00%) dari estimasi penerimaan pendapatan Lainnya TA 2013, sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 diterima pendapatan sebesar Rp. 4.642.590,00 (0,00% dari estimasinya).

Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)**

No.	Uraian	30 Juni	30 Juni	Perubahan	
		TA 2013	TA 2012	Rp.	%
1.	Pendapatan Lainnya	9.671.240,00	4.642.590,00	5.028.650,00	108,31
	Total	9.671.240,00	4.642.590,00	5.028.650,00	

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013

B.2. Belanja Negara

*Realisasi Belanja
(netto) : Rp.
1.844.367.363,00*

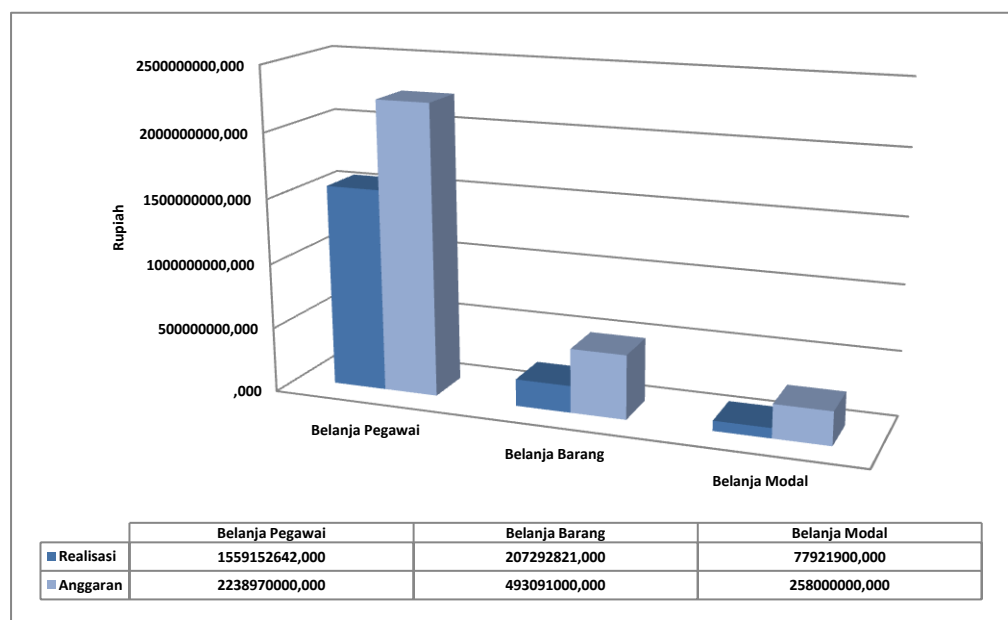
Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan pengeluaran belanja sebesar Rp. 551.008.411,00 (42,60%) dari pengeluaran tahun lalu pada periode yang sama.. Jumlah pengeluaran belanja pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 1.844.367.363,00 (61,68% dari anggarannya) , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 dikeluarkan belanja sebesar Rp. 1.293.358.952,00 (51,93% dari anggarannya).

Rincian Belanja Negara dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	30 Juni TA 2013		
		Pagu	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	2.238.970.000,00	1.559.152.642,00	69,63
52	Belanja Barang	493.091.000,00	207.292.821,00	42,03
53	Belanja Modal	258.000.000,00	77.921.900,00	30,20
	Total	2.990.061.000,00	1.844.367.363,00	61,68

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
(dalam satuan rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013 & 2012

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan	
				Rp.	%
51	Belanja Pegawai	1.559.152.642,00	1.064.154.530,00	494.998.112,00	46,51
52	Belanja Barang	207.292.821,00	198.654.422,00	8.638.399,00	4,34
53	Belanja Modal	77.921.900,00	30.550.000,00	47.371.900,00	155,06
	Total	1.844.367.363,00	1.293.358.952,00	551.008.411,00	42,60

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai (netto) :*
Rp.
1.559.152.642,00

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan pengeluaran belanja Pegawai sebesar Rp. 494.998.112,00 (46,51%) dari pengeluaran belanjatahun lalu pada periode yang sama.. Jumlah pengeluaran belanja Pegawai pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 1.559.152.642,00 (69,63% dari anggarannya) , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 dikeluarkan belanja sebesar Rp. 1.064.154.530,00 (53,50% dari anggarannya).

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

Uraian	2013	2012	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Gaji & Tunj. Pns	1.526.615.847,00	1.034.665.201,00	492.393.112,00	47,61
Belanja Lembur	32.539.000,00	29.934.000,00	2.605.000,00	8,70
Total	1.559.154.847,00	1.064.599.201,00	494.998.112,00	46,51
Pengembalian	-2.205,00	-444.671,00	442.466,00	-99,50
Netto	1.559.152.642,00	1.064.154.530,00	494.998.112,00	46,51

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang (netto) :
Rp.
207.292.821,00

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan pengeluaran belanja Barang sebesar Rp. 8.638.399,00 (4,34%) dari pengeluaran tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah pengeluaran belanja Barang pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 207.292.821,00 (42,03% dari anggarannya), sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 dikeluarkan belanja Barang sebesar Rp. 198.654.422,00 (42,20% dari anggarannya).

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

Uraian	2013	2012	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	116.601.770,00	75.540.835,00	41.060.935,00	54,35
Belanja Jasa	14.714.891,00	6.718.087,00	7.996.804,00	119,03
Belanja Pemeliharaan	43.126.160,00	61.100.500,00	-17.974.340,00	-29,41
Belanja Perjalanan Dinas	32.850.000,00	55.295.000,00	-22.445.000,00	-40,59
Total	207.292.821,00	198.654.422,00	8.638.399,00	4,34
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	207.292.821,00	198.654.422,00	8.638.399,00	4,34

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal (netto)
:Rp.
77.921.900,00

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan pengeluaran belanja Modal sebesar Rp. 47.371.900,00 (155,06%) dari pengeluaran tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah pengeluaran belanja Modal pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 77.921.900,00 (30,20% dari anggarannya) , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 dikeluarkan belanja Modal sebesar Rp. 30.550.000,00 (98,54% dari anggarannya).

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

Uraian	2013	2012	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	38.000.000,00	30.550.000,00	7.450.000,00	98,54
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	39.921.900,00	0,00	39.921.900,00	0,00
Total	77.921.900,00	30.550.000,00	47.371.900,00	155,06
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto	77.921.900,00	30.550.000,00	47.371.900,00	155,06

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Jumlah Kas di
Bendahara
Pengeluaran: Rp.
26.000.000,00*

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal 30 Juni

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 26.000.000,00 sedangkan per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2012 adalah tercatat sebesar Rp. 35.000.000,00

Tabel 11
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

No.	Jenis	Juni 2013	Juni 2012
1	Kas	26.000.000,00	35.000.000,00
	Jumlah	26.000.000,00	35.000.000,00

C.1.2. Persediaan

*Jumlah Persediaan:
Rp. 1.606.000,00*

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat penurunan nilai Persediaan sebesar Rp.

381.100,00 (19,17%) dari nilai per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Persediaan per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 1.606.000,00 , sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 1.987.100,00

Tabel 20 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2013

No.	Uraian	Jumlah
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Amunisi	0,00
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00
4	Suku Cadang	0,00
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,00
7	Bahan Baku	0,00
8	Barang dalam Proses	0,00
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0,00
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0,00
11	Persediaan lainnya	0,00

Mutasi persediaan per 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2012	1.987.100,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	
Mutasi Kurang	381.100,00
Habis Pakai	
Saldo per 30 Juni 2013	1.606.000,00

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik no W11-A20/1227a/PL.09/VI/2013 tgl 27 Juni 2013

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik/rusak.

C.2. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap
: Rp.
3.630.037.683,00

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat penurunan nilai Aset Tetap sebesar Rp. - 705.890.566,00 (16%) dari nilai per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Aset Tetap per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 3.630.037.683,00, sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 4.335.928.249,00

Tabel 21
Rincian Aset Tetap
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2013	30 Juni 2012	Perubahan(Rp.)
1	Tanah	1.803.217.500,00	1.803.217.500,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	613.367.796,00	647.163.791,00	-33.795.995,00
3	Gedung dan Bangunan	1.875.208.000,00	1.875.208.000,00	0,00
6	Jaringan	49.821.900,00	9.900.000,00	39.921.900,00
7	Aset Tetap Lainnya	438.958,00	438.958,00	0,00
<i>Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013</i>				

C.2.1. Tanah

Jumlah Aset
Tanah: Rp.
1.803.217.500,00

Per tanggal 30 Juni 2013 tidak terdapat perubahan nilai Tanah. Jumlah nilai Tanah per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 1.803.217.500,00

Tabel 22
Rincian Saldo Tanah
per 30 Juni TA 2013
(dalam satuan rupiah)

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1		2.079		Pengadilan Agama	DIP	1.664.952.500,00

2.	397	Purworejo	
3	200		DIP 97.265.000,00
			41.000.000,00
Jumlah			1.803.217.500,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Jumlah Aset
Peralatan dan
Mesin :Rp.
613.367.796,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat penurunan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp. -33.795.995,00 (5%) dari nilai per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 613.367.796,00, sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 647.163.791,00

Mutasi Aset Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah :

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)
Penambahan	
Penambahan Saldo Awal	0,00
Pembelian	38.000.00 0,00
Transfer masuk	0,00
Hibah masuk	0,00
Rampasan/sitaan	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00
Pengembangan Nilai	0,00
Pengurangan	
Pengurangan	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	65.538.771,00
Penghapusan	0,00
Transfer keluar	0,00
Hibah keluar	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00
Koreksi pencatatan	0,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Jumlah Aset
Gedung dan
Bangunan : Rp.
1.875.208.000,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 tidak terdapat perubahan nilai Gedung dan Bangunan. Jumlah nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 1.875.208.000,00

C.2.4. Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

*Jumlah Aset Jalan
dan Jembatan :Rp.
49.821.900,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan nilai Jaringan sebesar Rp. 39.921.900,00 (403,25%) dari nilai per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Jaringan per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 49.821.900,00 , sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 9.900.000,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Jumlah Aset Tetap
Lainnya: Rp.
438.958,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 tidak terdapat perubahan nilai Aset Tetap Lainnya. Jumlah nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 438.958,00

*Jumlah Aset Lainnya:
Rp. 4.336.771,00*

C.3. Aset Lainnya

Per tanggal 30 Juni 2013 tidak terdapat perubahan nilai Aset lainnya per 30 Juni TA 2012. Jumlah Aset lainnya per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 4.336.771,00 , sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 2.500.000,00

Tabel 27
Rincian Aset Lainnya
per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012
1	Aset tak Berwujud	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Aset Lain-lain	67.375.542,00	0,00

C.3.1. Aset tak berwujud

*Jumlah Aset tak
Berwujud :
Rp. 2.500.000,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 tidak terdapat perubahan nilai Aset tak Berwujud. Jumlah nilai Aset tak Berwujud per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 2.500.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

*Jumlah Aset Lain-lain :
Rp. 67.375.542,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp. 67.375.542,00 (0,00%) dari nilai per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Aset Lain-lain per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 67.375.542,00 , sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 0,00, Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

C.4. Kewajiban

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

*Jumlah Uang
Muka dari KPPN:*
Rp.
26.000.000,00

Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan nilai Uang Muka dari KPPN sebesar Rp. 26.000.000,00 (0,00%) dari nilai per 31 Desember TA 2012. Jumlah nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 26.000.000,00 , sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 35.000.000,00

C.5. Ekuitas Dana Lancar

C.5.1. Cadangan Persediaan

*Jumlah Cadangan
Persediaan:
Rp. 1.606.000,00*

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Agama Purworejo dalam bentuk persediaan.

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan nilai Cadangan Persediaan sebesar Rp. 82.300,00 (5,40%) dari nilai per 31 Desember TA 2012. Jumlah nilai Cadangan Persediaan per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 1.606.000,00 , sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 1.987.100,00

C.6. Ekuitas Dana Investasi

C.6.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

*Jumlah Ekuitas
Dana Investasi
Aset Tetap :
Rp.
3.630.037.683,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat penurunan nilai Ekuitas Dana Investasi Aset Tetap sebesar Rp. -705.890.566,00 (16%) dari nilai per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Ekuitas Dana Investasi Aset Tetap per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 3.630.037.683,00 , sedangkan per 31 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 4.335.928.249,00

C.6.2. Investasi Aset Lainnya

*Jumlah Ekuitas
Dana Investasi
Aset Lainnya :
Rp. 4.336.771,00*

Per tanggal 30 Juni 2013 terdapat kenaikan nilai Ekuitas Dana Investasi Aset Lainnya sebesar Rp. 1.836.771,00 (73,47%) dari nilai per 30 Juni TA 2012. Jumlah nilai Ekuitas Dana Investasi Aset Lainnya per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 4.336.771,00 , sedangkan per 30 Juni TA 2012 tercatat sebesar Rp. 2.500.000,00

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat hasil audit BPK yang harus ditindaklanjuti Pengadilan Agama Purworejo

D.2. Rekening Pemerintah

Daftar Rekening Pemerintah yang digunakan oleh Pengadilan Agama Purworejo dapat dilihat pada lampiran.

D.3. Pengungkapan Lain-lain

D.3.1. Revisi DIPA

Di semester I tahun 2013 ini terjadi 2 kali revisi di DIPA 01 Pengadilan Agama Purworejo yaitu revisi ke I tanggal 19 Maret 2013 dengan barcode 3502-0106-2600-5500, revisi ke II tanggal 5 Juni 2013 dengan barcode 7850-4072-7516-4988.

D.3.2. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purworejo Nomor W11-A20/0028/KU.01/I/2013 tentang penunjukkan Pejabat

Penanggung jawab kegiatan, penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima di Pengadilan Agama Purworejo dan ralat No. W11-A20/0183/KU.01/I/2013

Kuasa Pengguna Anggaran	H. Sukartun, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	H. Sukartun, SH
Pejabat Penandatanganan SPM	Murwati
Bendahara Pengeluaran	Sarno, SH
Bendahara Penerima	Mukhsin